

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Madura merupakan pulau yang terdiri dari empat kabupaten kecil yang ada di provinsi Jawa Timur. Diantaranya adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang yang biasa di kenal Madura bagian barat, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep merupakan Madura bagian timur. Pada umumnya, masyarakat Madura dikenal dengan masyarakat religius (awam) yang memiliki suku khas tersendiri yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Jika di di lihat dari perspektif pendidikan, Pulau Madura masih dapat dikatakan angka tertinggi rendahnya pendidikan dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Jawa Timur. Bahkan, stereotipe-stereotipe tentang berbagai kelompok penduduk umum mengacu penampilan luar ketika masih zaman kolonial, penggambaran ciri fisik orang Madura terus menerus menonjolkan perbedaan penampilan luar mereka dari orang Jawa dan Orang Sunda. Orang Madura digambarkan lebih kasar, lebih kaku, lebih garang, lebih kekar, lebih berani, dan badannya lebih kuat, (Sunrik dalam De Joong, 2011).

Gambaran di atas memang dapat dipahami sebagai karakter yang melekat pada masyarakat Madura. Tak hanya dalam stereotipe itu saja, dalam bidang pekerjaan pun masyarakat Madura di kenal lebih giat, lebih keras dan lebih ulet dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya. Ada pribahasa yang sering didengungkan oleh kaum pelajar pemuda (mahasiswa) dan para akademisi orang Madura yaitu “MATARAM” (Madura Tanah Garam). Kata singkatan itu seakan menggambarkan bahwa Madura merupakan pulau garam yang dari awal hingga sekarang masih sangat dikenal, bahkan tidak hanya lintas nasional, tetapi diberbagai manca Negara telah mengenalnya dengan sebutan tersebut. Jika kita pahami secara objektif, garam pulau Madura merupakan komoditi utama yang menjadikan Madura menjadi terkenal. Karena garam termasuk dari bagian kebutuhan makanan pokok secara nasional.

Pada abad ke-15, dalam perjalanan sejarah mencatat bahwa tentara Bali datang ke Madura dengan maksud membalas dendam kepada keturunan Jokotole.

Tentara Bali tersebut berlabuh di pantai Sumenep. Dalam sejarahnya, Jokotole adalah seorang pahlawan Madura yang gagah berani yang berhasil menaklukkan raja Blambangan pada waktu ia berperang melawan Majapahit. Namun, tentara Bali yang menganggap raja Blambangan itu nenek moyangnya, dapat dikalahkan oleh orang-orang Madura kala itu. Bala tentara Bali yang masih hidup melarikan diri ke desa Pinggir Papas (Gir Papas, menurut orang Madura). Desa Gir Papas itu terletak di antara kota Sumenep dan Kalianget perkiraan enam kilometer dari kota Sumenep. Di desa Pinggir Papas inilah bala tentara Bali menyerahkan diri kepada raja Sumenep, yakni Pengeran Wetan yang dengan kebijaksanaannya mereka diampuni dan mendapat tanah untuk membangun desa. Diantara tentara Bali tersebut ada seorang panglima perang yang bernama Anggosuto, dialah yang pertama kali mempunyai pikiran untuk membuat garam dari air laut yang dijemur (De Jonge, 2011) .

Menilik dari sejarah di atas, hal itu membuktikan bahwa hasil garam yang di buat dari air laut tersebut dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Seiring perjalanannya, ternyata pembuatan garam berkembang pesat di desa Pinggir Papas yang pada akhirnya menjadi embrio dari masyarakat Madura yang ada di pinggir pantai (laut) untuk membuat garam. Dengan membuminya garam di pulau Madura menjadikan pulau kecil ini sebagai salah satu komoditi garam terbesar di Nusantara.

Sejarah garam dalam perkembangannya hingga saat ini selalu miris, dikarekan ketidaksesuaian antara hasil panen dengan harga yang sangat murah, jika kita lihat dalam perjalanannya, produksi garam di Madura tetap menggunakan cara-cara tradisional. Namun perlu diketahui bersama, bahwa pengelolaan garam secara umum di Madura pada abad 19-an monopoli terhadap produksi dan pemasokan garam di Madura sangat terhalang oleh hubungan khusus antara pemerintah kolonial dan pemerintah pribumi. Hingga jauh memasuki abad ke 19, kadipaten-kadipaten di Madura memiliki pemerintahan sendiri. Sampai pertengahan abad itu, birokrasi kolonial setempat berada di bawah otoritas-otoritas pribumi, walaupun para penguasa di Madura telah menyerahkan hak memproduksi garam kepada pemerintah kolonial dengan imbalan tahunan dalam

jumlah tetap, para pejabat yang bertanggung jawab atas monopoli garam tetap sangat bergantung pada kerjasama para penguasa pribumi. Penyelenggaraan kekuasaan semacam itu bukan saja menyediakan pengawas untuk kerja pembuatan garam, tetapi juga melahirkan individu-individu yang melawan ketidakadilan (De Jonge, 2011).

Gambaran di atas secara analitis terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa waktu itu dengan menangguk pendapatan yang lebih besar. Cara yang mereka manfaatkan adalah menghasut segenap aparat agar bahu-membahu menghindari monopoli dan memeras penduduk. Pada paruh pertama abad ke-19, monopoli dan pemerasan memicu tindakan sewenang-wenang dengan memaksa sejumlah warga di beberapa tempat agar menggarap tambak garam dengan ancaman kekerasan. Pada masa itu warga banyak kabur ke Jawa (Van de Kemo dalam De Jonge, 2011).

Monopoli bukan saja menyebabkan penduduk di kawasan garam bersikap mendua atau memusuhi pemerintah, melainkan juga menimbulkan segala macam konflik antara pemilik tambak garam perseorangan, penggarap garam, pemberi hutang, kuli, pengontrak, dan pihak-pihak terkait lain. Untuk meredakan konflik ini pemerintah memperlebar jarak antara berbagai kelompok kerja itu untuk meredakan keresahan lewat tindakan khusus seperti menaikkan harga beli garam, melunasi pembayaran kepada pihak yang disebut sebagai orang Asia asing, dan memberikan uang muka lebih banyak untuk menangkai lintah darat, (Van der Kemp dalam De Jonge, 2011). Namun, tindakan-tindakan ini hanya memberikan ketenangan sementara kepada kelompok-kelompok tertentu, artinya dari berbagai tindakan tersebut sama sekali tidak mengubah sistem monopoli yang menjadi biang keladi.

Bila kita amati secara seksama, Madura tidak hanya dikenal sebagai MATARAM, tetapi masih banyak kekayaan alam lain yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah masing-masing yang ada di Madura. Namun garam seyogyanya menjadi kebutuhan pokok masyarakat umum secara global. Oleh karena itu garam khususnya di pulau Madura perlu

diperhatikan. Karena bila tidak, lambat laun masyarakat petani garam bisa saja akan beralih ke pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.

Tidak berlebihan kiranya apabila garam yang menjadi komoditi masyarakat pesisir menjadi salah satu andalan pokok kebutuhan pemerintah dalam mendistribusikan hasil panennya. Kita lihat dari semangat penggarap garam hingga detik ini dapat dikatakan mulai berkurang, bila kita bandingkan dengan tempo dahulu. Hal itu terjadi bisa saja karena faktor harga maupun cuaca alam. Tak hanya itu, tetapi kualitas produksi garam merupakan salah satu bagian penting yang berimbas pada harga garam di pasaran.

Menariknya, kebutuhan industri di Indonesia disuplai dari garam impor negara tetangga yang secara kualitas jauh lebih baik dibandingkan garam dalam negeri. Hal ini tetap terjadi hingga sekarang, sebab, kualitas garam sendiri tidak laku dipasaran/harga garamnya murah. Sekalipun hasil garapan PT. Garam sendiri tidak menutup kemungkinan kualitasnya lebih rendah daripada garam impor. Apalagi garam garapan petani yang punya lahan sendiri. Tentu akan jauh lebih rendah, sebab selama ini perhatian pemerintah utamanya PT. Garam terhadap petani garamnya sangatlah kurang. Terbukti, dari hasil olahan petani, kualitasnya tidak dapat diterima di pabrikan. Sehingga kemudian berdampak pada yang lain, terutama harga yang sangat miris (murah). Permasalahan harga inilah yang hingga saat ini selalu mencekik kepada para pegaram.

Akhir-akhir ini PT. Garam dengan petani garam mulai terjadi gesekan yang kurang mencerminkan kesepahaman diantara kedua belah pihak. Pertentangan masyarakat petani garam kepada PT. Garam mulai ditunjukkan dengan berbagai aksi besar-besaran dengan menuntut hak-hak para petani garam kepada pemerintah. Disadari atau pihak, petani garam tetap bergantung pada PT. Garam sebagai BUMN yang memiliki wewenang dan kebijakan dalam menentukan harga pasar garam. Hal ini menjadi konflik yang berkesinambungan di PT. Garam itu sendiri. Berdasarkan isu yang berkembang, pertentangan yang memicu terjadinya konflik adalah adanya impor garam yang berdampak pada anjloknya harga garam lokal serta adanya indikasi KKN yang melibatkan pejabat PT. Garam. Wajar kiranya masyarakat Petani Garam Se-Madura bersatu padu

menuntut kebijakan yang kurang pro terhadap mereka yang sudah bersusah payah menggarap lahannya untuk memproduksi garam sebagai kebutuhan masyarakat banyak namun masih dikesampingkan.

Terlepas dari semua itu, yang harus menjadi perhatian pemerintah, PT. Garam, Dinas-dinas terkait, serta DPRD adalah bagaimana menjadikan garam sebagai salah satu komoditi andalan serta suplay kebutuhan pemerintah untuk mendistribusikan hasil panen garam kepada pabrik-pabrik dan perusahaan yang membutuhkan selain masyarakat umum. Sehingga akan berdampak positif pula terhadap harga garam, perkembangan dan kemajuan masyarakat yang dalam memproduksi tambaknya khususnya di Madura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah;

Bagaimana Konflik yang terjadi antara PT. Garam dengan Pegaram Madura ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah;

Untuk mengetahui konflik petani garam dan PT. Garam di Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya tentang terjadinya konflik sebagai realitas sosial petani garam dan PT. Garam di tempat yang berbeda maupun tempat yang sama untuk memperkaya khasanah keilmuan dan pengetahuan mengenai pentingnya manajemen konflik pada masa selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- ✓ Dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah setempat mengenai konsep ke depan dalam menanggulangi konflik antar

PT. Garam dengan Petani Garam Madura yang di kenal sebagai “MATARAM”.

- ✓ Dapat di pakai sebagai data dasar untuk meningkatkan manejerial PT. Garam dalam menjalin interaksi serta kebijakan dan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya petani garam yang ada di Madura.
- ✓ Dapat memberikan gambaran umum tentang konflik yang terjadi sebagai realitas sosial serta memberikan wawasan pengetahuan kepada peneliti mengenai konflik pada masyarakat petani garam dan PT. Garam secara sosiologis